



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Efektivitas Kinerja Organisasi Pada Perangkat Daerah

Effectiveness of Organizational Performance in Regional Devices

Sri Yulianti Mozin^{1*}, Siti Nurcahyati Abdussamad²

^{1,2}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

*Corresponding Author: E-mail: yulmozin@ung.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Dec, 2025

Revised: 18 Jan, 2026

Accepted: 24 Jan, 2026

Kata Kunci:

Organisasi Perangkat Daerah,
Kinerja Manajerial,
Akuntabilitas Publik, Anggaran
Pemerintah, Sistem Informasi

Keywords:

Regional Apparatus
Organization, Managerial
Performance, Public
Accountability, Government
Budget, Information System

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10365](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10365)

ABSTRAK

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memegang peranan strategis dalam keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan yang mempengaruhi efektivitas kinerja OPD. Melalui tinjauan terhadap berbagai studi terkini, penelitian ini menelaah aspek partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, gaya kepemimpinan, kualitas pelaporan keuangan, serta implementasi teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja manajerial OPD sangat dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi aktif dalam penyusunannya. Selain itu, kualitas laporan keuangan dan kedisiplinan perencanaan pembangunan menjadi indikator utama transparansi instansi. Temuan juga menyoroti pentingnya adaptasi digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan urgensi koordinasi lintas sektoral dalam penanganan isu daerah. Kesimpulannya, penguatan kapasitas OPD memerlukan integrasi antara kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan pada regulasi, dan modernisasi sistem tata kelola.

ABSTRACT

Regional Apparatus Organizations (OPD) play a strategic role in the success of development and public services at the local level. This study aims to analyze the determinant factors influencing the effectiveness of OPD performance. Through a review of various recent studies, this research examines aspects of budget participation, public accountability, leadership style, financial reporting quality, and information technology implementation. The analysis results indicate that OPD managerial performance is significantly influenced by budget goal clarity and active participation in its preparation. Furthermore, the quality of financial reports and discipline in development planning serve as key indicators of institutional transparency. The findings also highlight the importance of digital adaptation through the Regional Government Information System (SIPD) and the urgency of cross-sectoral coordination in handling regional issues. In conclusion, strengthening OPD capacity requires the integration of human resource competence, regulatory compliance, and the modernization of governance systems.

PENDAHULUAN

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memegang peranan vital dalam struktur pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah, pelayanan publik, dan pembangunan wilayah. Kinerja manajerial dalam tubuh OPD menjadi indikator krusial keberhasilan tata kelola

pemerintahan, yang sangat dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran, serta akuntabilitas publik. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan gaya kepemimpinan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial (Dewi et al., 2021). Hal ini sejalan dengan temuan Prasetya et al. (2023) yang menegaskan bahwa selain partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran juga menjadi faktor determinan dalam mendorong akuntabilitas dan kinerja aparatur di tingkat kabupaten. Namun, tantangan dalam proses penganggaran masih sering terjadi, salah satunya adalah fenomena ratchet effect atau ketidakmurnian dalam penetapan target anggaran pendapatan dan belanja yang dapat mendistorsi efisiensi satuan kerja (Putri Intan Permata Sari et al., 2022). Di sisi lain, penyerapan anggaran yang optimal sangat bergantung pada motivasi dan komitmen organisasi dari para aparatur sipil negara di dalamnya (Saragih et al., 2022).

Selain aspek manajerial dan penganggaran, kualitas pelaporan keuangan dan perencanaan pembangunan merupakan pilar transparansi yang tidak dapat diabaikan. Kualitas informasi laporan keuangan OPD dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi (Widodo & Maharani, 2021). Determinan kualitas ini menjadi sorotan penting karena laporan keuangan yang akuntabel mencerminkan kredibilitas pemerintah daerah di mata publik (Mirnawati et al., 2021). Lebih jauh lagi, keberhasilan implementasi program kerja harus diawali dengan kualitas perencanaan pembangunan yang matang dan terukur di lingkungan perangkat daerah (Ridwan Saifuddin, 2022). Untuk mendukung integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang lebih transparan, pemerintah daerah kini mulai beralih pada pemanfaatan teknologi digital. Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi langkah strategis untuk meminimalisir kendala administratif dan meningkatkan efisiensi kerja perangkat daerah, sebagaimana ditemukan dalam studi kasus di Kabupaten Sumbawa Barat (Asmawati et al., 2024).

Dinamika OPD tidak hanya terbatas pada urusan administratif dan keuangan, tetapi juga mencakup responsivitas terhadap isu sosial dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), misalnya, memiliki fungsi spesifik dalam menegakkan peraturan daerah guna menjaga wibawa pemerintah (Suhendi, 2021). Kompleksitas masalah perkotaan, seperti penanggulangan banjir, juga menuntut adanya koordinasi lintas organisasi yang solid antar-OPD untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif (Septi Dwi Wulandari & Rahmat Salam, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana interaksi antara tata kelola anggaran, kualitas pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi lintas sektoral mempengaruhi kinerja Organisasi Perangkat Daerah secara keseluruhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan teoretis utama, penelitian ini mengadopsi teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Steers (1977). Dalam pandangannya, efektivitas bukanlah satu titik akhir pencapaian semata, melainkan suatu proses berkelanjutan di mana organisasi mampu mengenali, memperoleh, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Steers (1977) menekankan dimensi multivariat dalam pengukuran kinerja yang mencakup produktivitas, fleksibilitas atau kemampuan adaptasi, serta kepuasan kerja pegawai. Pendekatan multidimensi ini sangat relevan diterapkan pada sektor publik untuk menganalisis bagaimana variabel input seperti anggaran dan kompetensi SDM berinteraksi dalam menghasilkan outcome kinerja manajerial yang akuntabel.

Kinerja manajerial dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan konstruksi kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan sumber daya manusia. Berbagai studi empiris telah menyoroti bahwa efektivitas organisasi sangat bergantung pada bagaimana anggaran dikelola. Dewi et al. (2021) menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, serta gaya kepemimpinan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial. Temuan ini diperkuat oleh Prasetya et al. (2023), yang menegaskan bahwa selain partisipasi aktif, kejelasan sasaran anggaran juga menjadi variabel determinan dalam mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Namun, proses penganggaran tidak terlepas dari tantangan

perilaku. Putri Intan Permata Sari et al. (2022) mengungkapkan adanya fenomena ratchet effect dalam penetapan target anggaran yang berpotensi mendistorsi efisiensi. Di sisi lain, Saragih et al. (2022) menekankan bahwa realisasi atau penyerapan anggaran belanja sangat dipengaruhi oleh faktor internal individu, yakni motivasi kerja dan komitmen organisasi dari para aparatur.

Selain dimensi anggaran, transparansi melalui kualitas pelaporan keuangan menjadi indikator utama kredibilitas instansi. Mirnawati et al. (2021) menyatakan bahwa laporan keuangan yang akuntabel sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Kualitas informasi ini, menurut Widodo dan Maharani (2021), secara langsung dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan tingkat pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan OPD. Sejalan dengan kebutuhan akan teknologi, modernisasi tata kelola pemerintahan kini bertumpu pada digitalisasi. Asmawati et al. (2024) dalam studinya membuktikan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan langkah strategis yang terbukti mampu meminimalisir kendala administratif sekaligus meningkatkan efisiensi kinerja perangkat daerah.

Lebih jauh, keberhasilan kinerja OPD tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari kualitas perencanaan dan responsivitas operasional. Ridwan Saifuddin (2022) menyoroti bahwa kualitas perencanaan pembangunan yang terukur adalah fondasi utama sebelum implementasi program dijalankan. Dalam tataran eksekusi, peran OPD juga mencakup penegakan aturan dan penanganan isu publik. Suhendi (2021) mencatat fungsi vital Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah demi menjaga wibawa pemerintah. Sementara itu, untuk menanggulangi masalah perkotaan yang kompleks seperti banjir, Septi Dwi Wulandari dan Rahmat Salam (2022) menekankan urgensi koordinasi lintas organisasi yang solid antar-OPD. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja OPD memerlukan integrasi antara tata kelola internal yang baik dan kolaborasi eksternal yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review) untuk menganalisis faktor-faktor determinan yang mempengaruhi efektivitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menelaah dan mensintesis berbagai temuan studi terkini mengenai tata kelola pemerintahan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka tujuan penelitian. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti tidak mengambil data lapangan secara langsung, melainkan mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah terakreditasi dan relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur digital dengan kata kunci yang mencakup kinerja manajerial, akuntabilitas publik, penganggaran, serta sistem informasi pemerintahan. Sampel literatur yang digunakan mencakup studi-studi empiris yang dipublikasikan dalam rentang waktu terbaru untuk menjamin relevansi isu. Referensi utama yang menjadi bahan analisis meliputi penelitian tentang hubungan partisipasi anggaran dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja, seperti yang dilakukan oleh Dewi et al. (2021) serta Prasetya et al. (2023). Selain itu, literatur yang membahas tantangan teknis dalam penganggaran, seperti fenomena ratchet effect yang diteliti oleh Putri Intan Permata Sari et al. (2022) dan pengaruh motivasi aparatur yang dikaji oleh Saragih et al. (2022), juga dijadikan unit analisis untuk memetakan kendala internal OPD.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis). Tahapan analisis dimulai dengan mereduksi data dari berbagai sumber referensi untuk mengelompokkan variabel-variabel kunci seperti transparansi keuangan dan pemanfaatan teknologi. Dalam tahap ini, temuan mengenai determinan kualitas laporan keuangan dari Mirnawati et al. (2021) serta Widodo dan Maharani (2021) disandingkan untuk menemukan indikator transparansi yang konsisten. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji aspek modernisasi sistem dengan menelaah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan studi kasus Asmawati et al. (2024), serta aspek perencanaan pembangunan yang diuraikan oleh Ridwan Saifuddin (2022).

Validitas hasil sintesis dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai konteks studi yang berbeda, mulai dari aspek administratif hingga operasional lapangan seperti penegakan perda oleh Satpol PP (Suhendi, 2021) dan koordinasi penanggulangan bencana (Septi Dwi Wulandari & Rahmat Salam, 2022). Keseluruhan data yang telah diklasifikasikan kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai strategi penguatan kapasitas OPD, yang mencakup integrasi kompetensi SDM, kepatuhan regulasi, dan adaptasi teknologi informasi.

PEMBAHASAN

Mengacu pada perspektif Steers (1977) mengenai efektivitas organisasi, keberhasilan kinerja instansi pemerintah tidak dapat dilihat dari satu dimensi tunggal, melainkan merupakan resultan dari integrasi berbagai komponen organisasi. Steers (1977) berargumen bahwa efektivitas organisasi sangat bergantung pada keselarasan antara tujuan organisasi dengan perilaku individu di dalamnya, serta kemampuan organisasi beradaptasi terhadap lingkungan. Dalam konteks temuan penelitian ini, teori tersebut memberikan pisau analisis yang tajam untuk membedah bahwa kinerja OPD yang optimal lahir dari keseimbangan antara struktur (tata kelola anggaran dan sistem informasi) dan perilaku (motivasi dan partisipasi aparatur). Hal ini menegaskan bahwa pencapaian tujuan pembangunan daerah memerlukan pendekatan manajemen yang menyeluruh, sesuai dengan prinsip optimasi tujuan yang digagas oleh Steers (1977).

Relevansi teori Steers ini terkonfirmasi oleh temuan-temuan studi yang dianalisis, di mana efektivitas OPD terbukti sebagai konstruksi multidimensi yang tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kualitas proses pengelolaannya. Hal ini terlihat secara empiris dari peran partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran yang berfungsi sebagai mekanisme adaptasi internal untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut, dimensi adaptabilitas dalam konsep Steers tercermin kuat pada urgensi transformasi digital melalui SIPD serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah. Temuan ini menegaskan bahwa kemampuan OPD untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan dinamika lingkungan merupakan indikator vital bagi keberhasilan kinerja yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip fleksibilitas organisasi yang ditekankan oleh Steers.

Dinamika pengelolaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di era otonomi daerah menuntut adanya integrasi yang solid antara manajemen keuangan, kualitas sumber daya manusia, dan adaptasi teknologi. Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai studi empiris terkini, efektivitas kinerja OPD tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor determinan. Pembahasan ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana aspek penganggaran, pelaporan keuangan, teknologi informasi, hingga koordinasi operasional saling berkontribusi dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Determinan Kinerja Manajerial: Dinamika Anggaran dan Perilaku Organisasi

Fondasi utama dari kinerja OPD terletak pada bagaimana proses penganggaran dilakukan. Anggaran bukan sekadar dokumen finansial, melainkan instrumen pengendalian manajemen yang krusial. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2021) memberikan bukti empiris bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Ketika aparatur dilibatkan secara aktif dalam penyusunan anggaran, timbul rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap target yang telah ditetapkan. Partisipasi ini meminimalisir kesenjangan informasi antara atasan dan bawahan, sehingga target yang disusun menjadi lebih realistis dan dapat dicapai. Hal ini diperkuat oleh gaya kepemimpinan yang suportif, yang menurut studi yang sama, mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan kinerja.

Namun, partisipasi saja tidak cukup tanpa adanya kejelasan arah. Prasetya et al. (2023) memperluas perspektif ini dengan menekankan pentingnya kejelasan sasaran anggaran (*budget goal clarity*). Aparatur pemerintah sering kali menghadapi ambiguitas peran jika tujuan anggaran tidak

didefinisikan secara spesifik. Kejelasan sasaran membantu aparaturnya memahami apa yang diharapkan dari mereka, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas publik. Ketika sasaran jelas dan penyusunannya partisipatif, akuntabilitas bukan lagi menjadi beban administratif, melainkan budaya kerja yang mendorong efisiensi.

Akan tetapi, proses penganggaran di sektor publik tidak terlepas dari distorsi perilaku yang dapat menghambat efisiensi. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah ratchet effect, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Putri Intan Permata Sari et al. (2022) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sumatera Barat. Fenomena ini terjadi ketika satuan kerja cenderung menetapkan target anggaran yang lebih rendah dari kemampuan sebenarnya atau membelanjakan anggaran secara berlebihan di akhir periode semata-mata untuk menghindari pemotongan anggaran di tahun berikutnya. Perilaku ini menciptakan ketidakmurnian dalam penetapan target dan inefisiensi alokasi sumber daya. Temuan ini menjadi peringatan kritis bahwa sistem penganggaran yang kaku tanpa evaluasi kinerja yang berbasis outcome dapat memicu perilaku oportunistik yang merugikan keuangan daerah.

Selain masalah penetapan target, eksekusi atau penyerapan anggaran juga menjadi indikator kinerja yang vital. Penyerapan yang rendah sering kali bukan disebabkan oleh ketiadaan dana, melainkan faktor internal aparaturnya. Saragih et al. (2022) menyoroti bahwa motivasi kerja dan komitmen organisasi berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat penyerapan anggaran. Aparaturnya yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi akan berusaha mengatasi kendala teknis dan administratif untuk memastikan program berjalan. Sebaliknya, tanpa motivasi yang kuat, kendala sekecil apa pun dapat menjadi alasan terhambatnya realisasi anggaran. Oleh karena itu, penguatan aspek psikologis dan budaya organisasi menjadi sama pentingnya dengan aspek teknis penganggaran.

Transparansi dan Kualitas Pelaporan Keuangan

Setelah anggaran dieksekusi, pertanggungjawaban menjadi fase krusial berikutnya. Kualitas laporan keuangan OPD adalah cerminan dari akuntabilitas instansi di mata publik. Mirnawati et al. (2021) menegaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas tinggi merupakan determinan utama dalam membangun kepercayaan publik. Laporan yang andal, relevan, dan dapat dipahami menunjukkan bahwa OPD mengelola dana publik dengan transparan. Namun, menciptakan laporan keuangan yang berkualitas bukanlah pekerjaan mudah dan sangat bergantung pada infrastruktur pendukung.

Widodo dan Maharani (2021) mengidentifikasi dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, yaitu kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi. Kompetensi SDM mencakup pemahaman akuntansi pemerintahan dan regulasi yang berlaku. Tanpa staf yang kompeten, teknologi canggih apa pun tidak akan menghasilkan laporan yang valid. Sebaliknya, SDM yang kompeten tanpa dukungan teknologi akan kewalahan menghadapi volume transaksi pemerintah yang besar. Oleh karena itu, sinergi antara peningkatan kapasitas aparaturnya dan modernisasi perangkat lunak akuntansi adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya transparansi keuangan daerah.

Transformasi Digital dan Perencanaan Pembangunan

Merespons kebutuhan akan efisiensi dan transparansi, pemerintah daerah kini bergerak menuju digitalisasi total melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Studi kasus yang dilakukan oleh Asmawati et al. (2024) di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa implementasi SIPD memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja. Aplikasi ini mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dalam satu basis data, sehingga meminimalisir duplikasi data dan kesalahan input manual. Keberhasilan implementasi SIPD membuktikan bahwa transformasi digital adalah solusi konkret untuk mengatasi fragmentasi birokrasi yang selama ini menjadi penghambat kinerja OPD.

Namun, teknologi hanyalah alat bantu (enabler); keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas input data, yang berawal dari perencanaan. Ridwan Saifuddin (2022) menekankan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah adalah hulu dari segala aktivitas OPD. Perencanaan yang buruk, yang tidak berbasis data atau tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat, akan menghasilkan program yang tidak efektif meskipun didukung oleh sistem informasi yang canggih. Oleh sebab itu, sebelum melangkah pada digitalisasi, OPD harus memastikan bahwa dokumen perencanaan mereka telah disusun secara matang, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Dinamika Operasional dan Koordinasi Lintas Sektoral

Di luar aspek administratif dan keuangan, kinerja OPD juga diuji melalui responsivitas mereka terhadap isu-isu lapangan. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diteliti oleh Suhendi (2021) memberikan gambaran tentang fungsi OPD sebagai penegak wibawa pemerintah. Kinerja Satpol PP tidak diukur dari penyerapan anggaran semata, melainkan dari efektivitas penegakan peraturan daerah (Perda) dan terciptanya ketertiban umum. Ini menunjukkan bahwa dimensi kinerja OPD sangat bervariasi tergantung pada tugas pokok dan fungsinya, menuntut pendekatan manajerial yang adaptif.

Lebih jauh lagi, tantangan pemerintahan modern yang semakin kompleks sering kali tidak dapat diselesaikan oleh satu OPD saja. Masalah seperti penanggulangan banjir di daerah perkotaan, sebagaimana dikaji oleh Septi Dwi Wulandari dan Rahmat Salam (2022), menuntut adanya koordinasi lintas organisasi yang solid. Ego sektoral sering kali menjadi penghambat utama dalam penanganan isu-isu lintas sektor. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan sangat bergantung pada kemampuan OPD untuk berkolaborasi, berbagi sumber daya, dan menyatukan langkah dalam situasi krisis. Koordinasi yang buruk tidak hanya menghambat pelayanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian material dan sosial bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis terhadap berbagai literatur ini mengerucut pada satu sintesis bahwa penguatan kapasitas OPD harus dilakukan secara holistik. Tidak mungkin mengharapkan laporan keuangan yang baik (Widodo & Maharani, 2021) tanpa didukung oleh sistem penganggaran yang partisipatif dan bebas dari ratchet effect (Dewi et al., 2021; Putri Intan Permata Sari et al., 2022). Demikian pula, implementasi teknologi seperti SIPD (Asmawati et al., 2024) harus dibarengi dengan perencanaan pembangunan yang berkualitas (Ridwan Saifuddin, 2022) dan komitmen organisasi yang kuat dari para aparaturnya (Saragih et al., 2022). Sinergi antara sistem yang handal, manusia yang kompeten, dan kolaborasi yang efektif adalah kunci utama keberhasilan OPD.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditentukan oleh sinergi antara tata kelola anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan adaptasi teknologi. Partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran terbukti krusial dalam meningkatkan akuntabilitas manajerial, namun harus disertai mitigasi terhadap distorsi perilaku anggaran. Di sisi lain, kualitas pelaporan keuangan dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi pilar utama transparansi dan efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas OPD menuntut pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan regulasi semata, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektoral yang solid demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmawati, N., Suparman, S., & Gunawan, H. (2024). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3376>
- Dewi, L. P. W., Sastri, I. I. D. A. M., & Sanjaya, I. K. P. W. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Organisasi

- Perangkat Daerah Kabupaten Bangli. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2). <https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3365.75-81>
- Mirnawati, M., Nirwana, E., & Hendarsyah, D. (2021). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.73>
- Prasetya, R. A., Suparwati, Y. K., & Kristanto, R. S. (2023). PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan). *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1). <https://doi.org/10.35829/magisma.v11i1.282>
- Putri Intan Permata Sari, Wijaya, R. A., Saputra, D., & Yudha, A. M. (2022). Efek Ratchet Dalam Anggaran Pendapatan Dan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.30656/jak.v9i1.3644>
- Ridwan Saifuddin. (2022). KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 10(03). <https://doi.org/10.35450/jip.v10i03.326>
- Saragih, R. J. P., Simanjuntak, A., & Sembiring, Y. N. (2022). Peran Motivasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 4(1). <https://doi.org/10.36985/jia.v4i1.372>
- Septi Dwi Wulandari, & Rahmat Salam. (2022). KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3). <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2760>
- Suhendi, D. (2021). SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJAGA WIBAWA PEMERINTAH DENGAN MENEGAKAN PERATURAN DAERAH. *Jurnal Tatapamong*. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Widodo, S., & Maharani, R. R. (2021). Pengujian kualitas informasi laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 3(1). <https://doi.org/10.36067/jbis.v3i1.95>